

Faktor - Faktor yang Memengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Rida Fauziah¹, Vera Amelia², Sy. Saskia Almahdali³, Meyzi Hari Yanti⁴, Maya Panorama⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang

E-mail: ridafauziahmfz@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the influence of gross Domestic Product (GDP) distribution, infrastructure development, and investment realization on regional economic inequality in Indonesia. the results of the analysis indicate significant development disparities, where national economic contribution remains concentrated in specific regions. the development of road, electricity, and the human development index (IPM). However, the distribution of these resources is not yet equitable and is still dominated by the consumption sector. On the other hand, foreign investment in the industrial sector which reached 8.000 million US\$ and the transportation sector have become primary drivers of growth through job creation and technology transfer. Equitable capital allocation and the acceleration of infrastructure development in disadvantaged regions are essential to reduce income inequality and strengthen national economic competitiveness globally.*

Keywords: *GDP , infrastructure, investment, economic inequality, and regional growth.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaruh distribusi Produk Domestik Bruto (PDB). Pembangunan infrastruktur, dan realisasi investasi terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan adanya disparitas pembangunan yang signifikan, dimana kontribusi ekonomi nasional masih terpusat di wilayah tertentu, pembangunan infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih terbukti menjadi faktor krusial dalam mendorong produktivitas dan indeks pembangunan manusia (IPM). Meskipun distribusinya belum merata dan masih di dominasi oleh beban sektor konsumtif. Di sisi lain, investasi luar negeri pada sektor perindustrian mencapai 8.000 juta US\$ dan transportasi menjadi pendorong utama pertumbuhan melalui penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Pemerataan alokasi modal dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan serta memperkuat daya saing ekonomi nasional secara global.

Kata kunci: PDB, infrastruktur, investasi, ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah

Pendahuluan

Ketidaksetaraan ekonomi pembangunan di Indonesia adalah permasalahan structural sebagai pusat perhatian khusus dalam proses pembangunan nasional. Keseluruhan dalam pembangunan daerah adalah fenomena yang sering muncul dalam aktivitas ekonomi suatu wilayah. Umumnya perbedaan ini berasal dari variasi sumber daya alam serta letak geografis pada setiap daerah. Dinamika pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah, karena populasi merupakan pengaruh elemen krusial dalam aktivitas ekonomi serta dalam upaya membangun perekonomian. Penduduk menyediakan angkatan kerja maupun pimpinan perusahaan, dan wirausaha yang berperan penting dalam memfasilitasi roda ekonomi.

Wilayah Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang dimana menciptakan 34 provinsi yang mempunyai karakteristik yang unik antarwilayah. Variasi mencakup dalam konteks alam, sosial, ekonomi, dan banyak lainnya disebabkan penyebaran yang berbeda di setiap daerah atau provinsi. Keunikan tersebut menjadi tantangan untuk keseimbangan ekonomi karena adanya konsentrasi aktivitas ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat di berbagai provinsi yang memiliki sumber daya alam yang kaya. Ini adalah faktor yang mengakibatkan ketidakmerataan. Beberapa kebijakan yang lebih mengutamakan pengembangan pusat ekonomi di pulau Jawa juga turut menyetujui ketimpangan tersebut.

Kesenjangan ini menunjukkan pada ketidaksetaraan yang signifikan diantara kalangan dengan pendapatan tinggi dan juga kalangan pendapatan bawah dalam suatu masyarakat dan negara. Penyebab dari kesenjangan ekonomi itu banyak sekali, termasuk seperti penghasilan, proses pendidikan dan pelatihan, ketidakmerataan jalan untuk sumber daya, dan juga ketidakadilan dalam ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi merupakan hal krusial dan perlu di amati, ketidakstabilan, fluktuasi ekonomi, serta rendahnya perkembangan ekonomi adalah menimbulkan konflik ketidakpuasan antar rakyat, kemudian menghalangi tercapainya perkembangan yang berkelanjutan

Pembangunan ekonomi mencerminkan langkah kenaikan pendapatan riil per individu dalam waktu panjang, yang berjalan melalui pembaharuan tata kelola di dalam pemerintahan. Kesuksesan dalam pertumbuhan bisa diukur dengan indikator-indikator yang merefleksikan bagian penting dari pembangunan. Meliputi aspek-aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia, hukum, dan keadilan sosial secara umum. Distribusi hasil pembangunan yang merata penting untuk menghindari penyebab terjadinya ketidakmerataan pendapatan yang dapat memicu kecemburuan sosial serta permasalahan di masyarakat.

Selain aspek keuangan, ketidakmerataan ekonomi juga merupakan topik krusial dalam pengembangan ekonomi daerah. Ketidakmerataan yang signifikan dapat menghambat kemajuan ekonomi karena distribusi pendapatan yang tidak seimbang mengakibatkan terbatasnya kemampuan beli masyarakat serta rendahnya keterlibatan dalam ekonomi. Pada kawasan yang mempunyai kelimpahan akan sumber daya alam,

ketidakmertaan sering muncul akibat pembagian keuntungan ekonomi yang tidak seimbang dari sektor ekstraktif, yang umumnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Situasi ini dapat berpotensi memperburuk perbedaan sosial dan ekonomi antara masyarakat serta antar daerah.

Ketimpangan ekonomi pembangunan adalah isu utama di negara berkembang seperti Indonesia. ketimpangan menggambarkan kondisi dimana hasil pembangunan tidak sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat maupun antarwilayah. Salah satu faktor utama yang memengaruhi ketimpangan adalah infrastruktur yang baik merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Wilayah dengan akses jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang baik cenderung lebih menarik bagi investor dan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

Perbedaan kualitas dan akses pendidikan antar wilayah sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Wilayah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki tenaga kerja yang lebih produktif dan mampu mengakses pekerjaan dengan penghasilan lebih baik. Teori ketimpangan pendapatan pada tahap awal pertumbuhan ekonomi atau ketika pembangunan dimulai distribusi pendapatan cenderung memburuk atau tidak merata, lalu selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik dan merata.

Hal tersebut dikarenakan pada waktu proses pembangunan baru dimulai di negara sedang berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada tentunya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik. Sedangkan pada daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu melaksanakan peluang karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Teori indeks pembangunan manusia menurut Mankiw, modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan. Mengatakan bahwa pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah dapat meningkatkan pendapatan perkapita sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.

Kualitas sumber daya manusia atau yang dikenal sebagai indeks pembangunan manusia, besar tinggi atau rendahnya indeks pembangunan manusia akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk semakin rendah indeks pembangunan manusia maka tingkat produktivitas yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan. Upaya pembangunan ekonomi nasional bersifat strategis untuk mengangkat taraf hidup seluruh penduduk lewat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. Dalam ranah Indonesia, yang memiliki wilayah luas dan sumber daya beragam, realisasi pembangunan ekonomi nasional tidak dapat optimal tanpa dukungan kuat dari

otoritas daerah.

Sistem desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah memberi wewenang yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyusun strategi serta kebijakan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat, sambil tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Walaupun kebijakan desentralisasi menyediakan ruang bagi daerah menjadi lebih mandiri, pelaksanaannya menghadapi beragam tantangan. Kesenjangan antarwilayah, keterbatasan kapasitas SDM, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering menjadi hambatan utama. Selain itu, perencanaan pembangunan yang tidak terkoordinasi antara tingkat pusat dan daerah dapat menimbulkan inefisiensi serta menghalangi tercapainya target pembangunan ekonomi nasional.

Rancangan pembangunan ekonomi nasional merupakan proses terstruktur dan terkoordinasi yang dilaksanakan pemerintah untuk menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, serta tindakan yang diperlukan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan pembangunan inklusif serta berkelanjutan di tingkat negara. Rancangan ini menargetkan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya saing internasional, serta menjamin pemerataan hasil pembangunan di seluruh daerah. Strategi pembangunan merupakan arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran tersebut, meliputi upaya jangka panjang seperti memperkuat sektor industri, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, melakukan transformasi digital, dan meningkatkan investasi baik domestik maupun asing.

Pertumbuhan ekonomi sering dipakai sebagai ukuran keberhasilan pembangunan, di antaranya terlihat dari menurunnya tingkat kemiskinan di wilayah atau negara tertentu, karena penurunan jumlah penduduk miskin menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan. Karena itu, setiap negara harus senantiasa berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika suatu negara gagal meningkatkan pertumbuhannya, akan muncul masalah ekonomi dan sosial baru, misalnya meningkatnya tingkat kemiskinan. Ketimpangan pendapatan adalah penyebaran total pendapatan nasional yang tidak merata di antara rumah tangga yang beragam dalam suatu negara. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbedaan besar pendapatan yang diterima masyarakat, yang memperlebar jurang ekonomi antar kelompok. Akibatnya, orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin.

Penanaman modal pada sektor transportasi, energi, telekomunikasi/digital, serta infrastruktur sosial secara substansial mengangkat PDB per kapita, baik lewat peningkatan efisiensi produksi maupun efek spillover antar sektor. Infrastruktur transportasi terbukti mengurangi biaya logistik dan memperkuat integrasi pasar, sementara infrastruktur energi menjamin pasokan listrik bagi kegiatan industri dan transformasi ekonomi. Infrastruktur telekomunikasi dan digital berperan dalam memacu

inovasi serta produktivitas pada ekonomi berbasis pengetahuan, sementara infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyiapkan fondasi bagi pertumbuhan inklusif jangka panjang.

Namun, mutu tata kelola, kesetaraan antar wilayah, akses dana, dan dampak lingkungan semuanya memengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, kajian menyarankan penerapan strategi terpadu dan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur guna memastikan manfaat yang adil serta mendukung agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, infrastruktur tetap menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, serta produktivitas negara. Pada umumnya, penanaman modal di bidang transportasi, energi, telekomunikasi/digital, dan infrastruktur sosial telah mendorong kenaikan PDB per kapita, menurunkan biaya transaksi, dan memperluas akses pasar, diperkirakan dapat menambah laju pertumbuhan ekonomi antara 0,5 hingga 2 % tiap tahun.

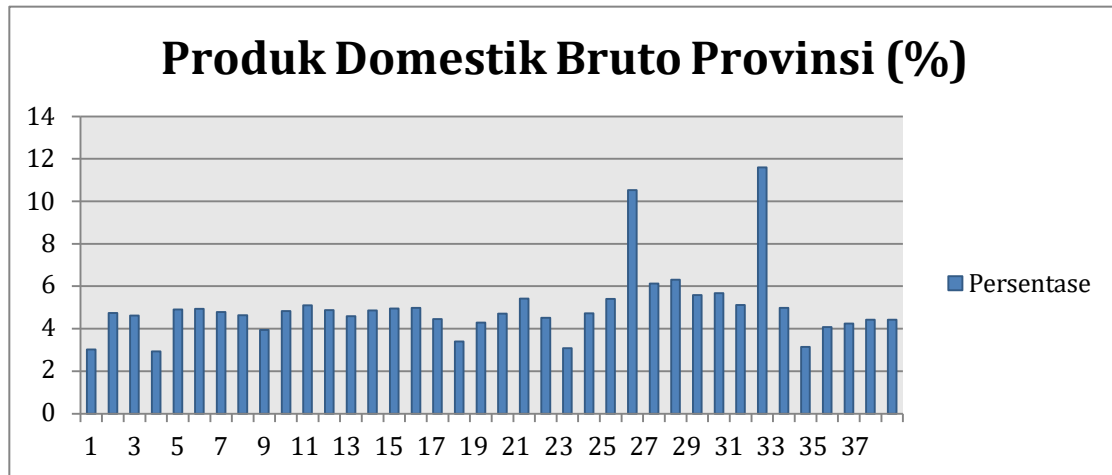
Metode

Metode penelitian artikel ini adalah tinjauan pustaka dengan menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif. Strategi ini diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini berfokus pada variabel infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan belanja modal negara, serta bagaimana variabel-variabel ini berhubungan dengan indikator pertumbuhan ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB).

Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu,. Dan teknik pengumpulan data melalui studi literatur (Library Research) mengumpulkan informasi dari buku, jurnal akademik, dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan ketimpangan pembangunan ekonomi, dan mengumpulkan data dari sumber resmi seperti laporan statistik, laporan pemerintah, serta arsip yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah.

Hasil dan Diskusi

Produk domestik bruto menggambarkan seberapa besar kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan produk dan layanan ekonomi. Berikut gambaran pertumbuhan produk domestik bruto regional selama periode 2011-2025.



Gambar 1 : Produk Domestik Bruto Provinsi

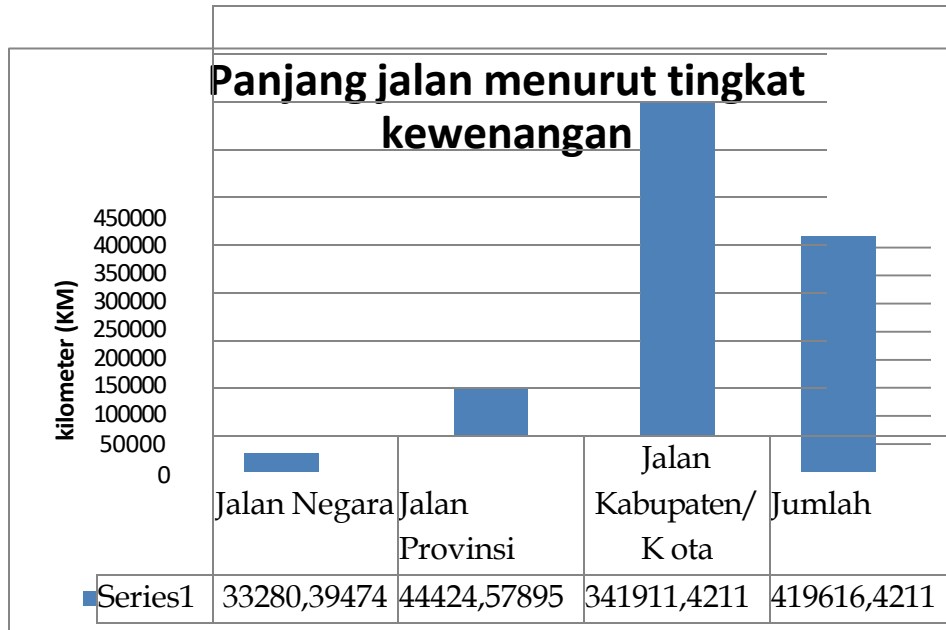
Sumber : Badan Pusat Statistika, diolah

Berdasarkan grafik produk domestic bruto provinsi (%) menunjukkan distribusi presentase produk domestik bruto (PDB) dari 38 provinsi di Indonesia. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi negara adalah produk domestik bruto, dengan grafik tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi ekonomi setiap provinsi memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan menggambarkan bahwa tingkat pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia masih belum merata. Berdasarkan data pada grafik, provinsi ke-32 menjadi wilayah dengan kontribusi PDB tertinggi, yaitu mencapai sekitar 11-12%. Selain itu, provinsi ke-26 menunjukkan kontribusi yang cukup besar yakni sekitar 10%. Tingginya kontribusi kedua provinsi tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi lebih mengacu pada wilayah tertentu yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Perbedaan kontribusi PDB antarprovinsi mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah. Ketimpangan kontribusi berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Wilayah dengan kontribusi ekonomi tinggi memiliki pendapatan masyarakat yang baik, kesempatan kerja lebih luas, serta fasilitas public yang memadai. Dan sebaliknya, daerah yang dengan kontribusi ekonomi rendah sering menghadapi permasalahan seperti tingkat kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan dan keterbatasan akses kesehatan. Ketimpangan ini memicu perpindahan penduduk dari daerah tertinggal menuju daerah yang maju.

Sumber daya alam Indonesia masih menjadi daya tarik khusus bila dibandingkan dengan negara Asean lainnya, karena posisi serta kualitas daya alam dan tenaga manusianya. Padahal, seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan kesiapan unyuk meningkatkan mutu infrastruktur, tenaga kerja, pengetahuan, dan aspek fisik. Pemerintah juga perlu mendorong pemerataan agar tidak terlalu fokus pada wilayah maju, tetapi juga masuk ke dalam daerah atau wilayah yang tertinggal. Pengembangan infrastruktur meningkatkan efisiensi pasar melalui mekanisme pasar yang kompetitif,

memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 2 : Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan

Sumber : Badan Pusat Statistika, diolah

Distribusi panjang jalan di Indonesia berdasarkan pihak yang memiliki kewenangan dalam penggelolaannya, yaitu jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Data ini menunjukkan total panjang jalan di Indonesia mencapai sekitar 419.616 kilometer, dari keseluruhan panjang jalan, sebagian besar berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan jalan negara dan jalan provinsi memiliki panjang yang relative lebih kecil. Berdasarkan grafik, panjang jalan negara tercatat sekitar 33.280 kilometer. Jalan negara adalah jalan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memiliki fungsi utama sebagai penghubung antar provinsi, pusat kegiatan nasional, kawasan industri dan wilayah strategis lainnya.

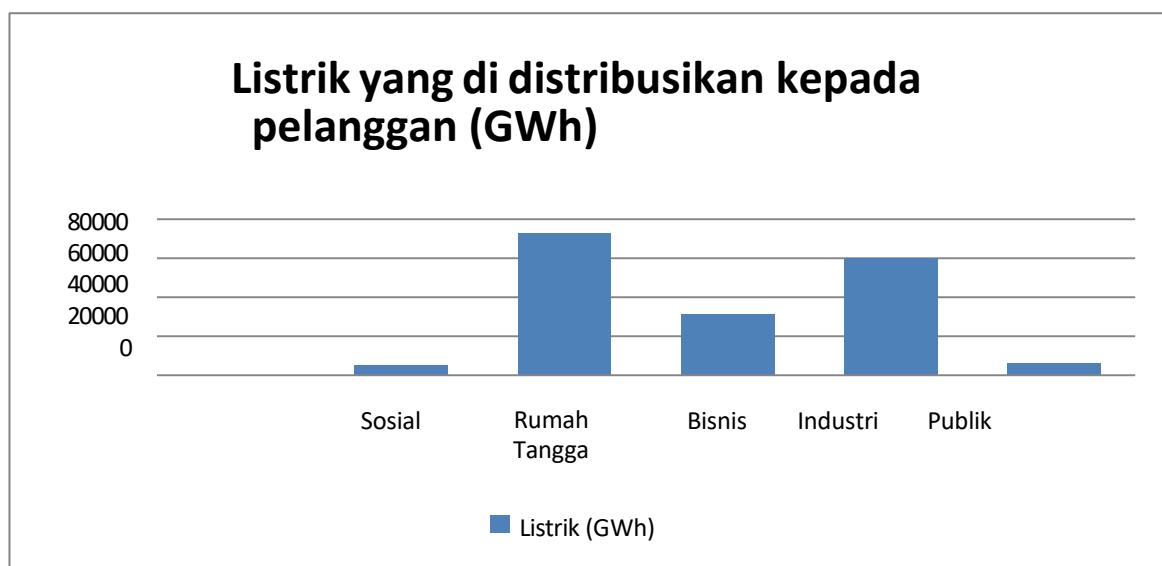
Perbedaan panjang jalan menurut tingkat kewenangan menggambarkan struktur pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia jalan negara lebih di khususkan unutm mendukung konektivitas nasional dan jalur strategis ekonomi. Sedangkan, jalan provinsi dan kabupaten/kota lebih berperan dalam mendukung konektivitas regional dan lokal. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, keberadaan infrastruktur jalan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Jalan yang baik dapat mempercepat distribusi hasil produksi, merunkan biaya logistic, meningkatkan akses pasar dan juga memperluas akses peluang investasi.

Pembangunan jalan berpengaruh, sehingga peningkatan jaringan jalan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Mencakup daya beli yang tercermin

dari pendapatan per kapita. Kelancaran transportasi darat sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan, karena jalan yang layak mempermudah distribusi barang serta mobilitas manusia dan tenaga kerja. Selain sebagai sarana fisik, infrastruktur berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik bisa meningkatkan pertumbuhan produk domestik regional bruto.

Infrastruktur jalan di Indonesia memainkan peran penting bagi transportasi nasional, melayani sekitar 92% perjalanan penumpang dan 90 pengangkutan barang. Hingga kini, nilai kapitalisasi asset infrastruktur jalan nasional telah melampaui dua ratus triliun rupiah, menandakan kontribusinya yang strategis dalam menurunkan biaya transportasi. Jika pembangunan infrastruktur jalan terus berjalan dan tersebar merata, hal tersebut akan menjadi faktor yang memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing ekonomi daerah dalam konteks nasional, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional di panggung internasional.

Keseluruhan grafik panjang jalan berdasarkan tingkat kewenangan mengindikasikan bahwa jaringan jalan di Indonesia mayoritas terdiri dari jalan kabupaten/kota yang melayani kebutuhan masyarakat setempat. Disisi lain, jalan provinsi dan jalan negara berperan strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tergantung pada infrastruktur yang berjalan dengan baik. Sarana transportasi yang memadai, seperti jalan, dermaga, dan bandar udara, memperbaiki efisiensi dalam penyaluran barang dan layanan. Menurunkan pengeluaran logistik dan durasi perjalanan, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing produk di pasar internasional.



Gambar 3 : Listrik yang di Distribusikan Kepada Pelanggan (GWh)

Sumber : Badan Pusat Statistika, diolah

Pendistribusian Energi listrik kepada beberapa kelompok pelanggan, yaitu sektor sosial, rumah tangga, bisnis, industri dan publik. Dominasi utama terlihat pada sektor

rumah tangga yang mencatat angka distribusi tertinggi, berkisar pada angka 70.000 hingga 75.000 GWh. Tingginya angka pada sektor residensial ini mengindikasikan bahwa beban listrik nasional sangat dipengaruhi oleh konsumsi domestik, yang secara teknis sering menciptakan lonjakan beban puncak pada waktu tertentu.

Sektor industri memberikan kontribusi distribusi yang signifikan namun tetap berada di bawah sektor rumah tangga, yakni di kisaran 60.000 GWh. Secara teknis, konsumsi industri cenderung lebih stabil di dibandingkan dengan sektor lainnya karena operasional mesin yang berlangsung terus-menerus dalam durasi yang panjang. Selisih antara sektor rumah tangga dan industri memberikan sinyal bahwa ekonomi wilayah tersebut masih bersifat konsumtif, sementara sektor bisnis menempati posisi menengah dengan tingkat distribusi energy yang mencerminkan dinamika aktivitas komersial seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran. kemudian pada sektor sosial dan publik menunjukkan angka distribusi yang paling rendah.

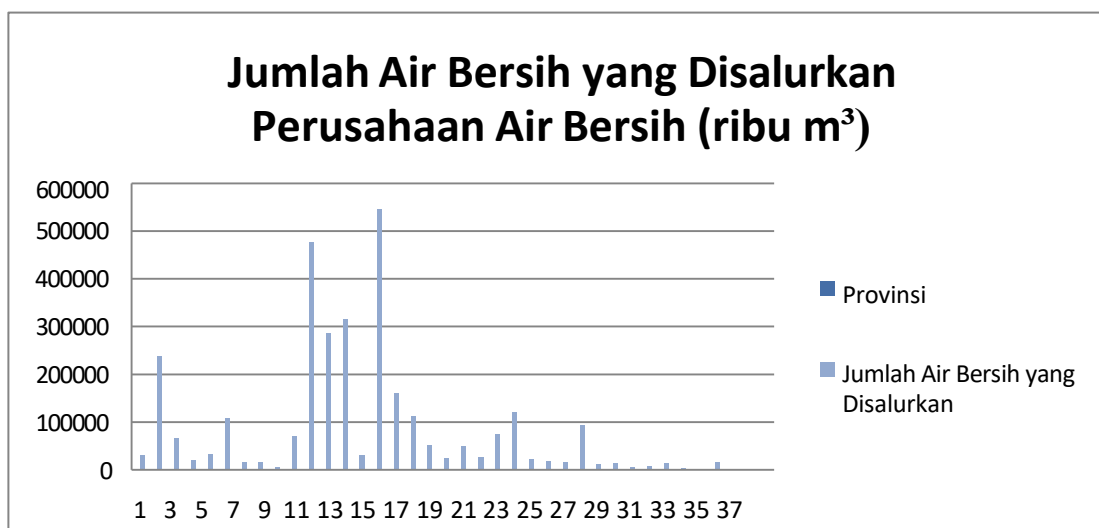
Infrastruktur listrik menjadi kebutuhan utama tidak hanya bagi rumah tangga, melainkan juga bagi sektor ekonomi industri. Permintaan akan infrastruktur listrik kini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat yang semakin modern, seiring bertambahnya jumlah peralatan rumah tangga, peralatan kantor, serta beragam aktivitas lainnya yang mengadakan listrik sebagai sumber energi. Listrik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penerangan serta proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan peralatan atau mesin industri.

Infrastruktur kelistrikan mencakup rangkaian fasilitas serta peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan dan menyalurkan listrik. Komponenya meliputi pembangkit listrik, misalnya pembangkit uap, pembangkit hidro, pembangkit nuklir, serta pembangkit yang memanfaatkan energi terbarukan jaringan transmisi yang mengirimkan listrik dari pembangkit pembangkit ke titik distribusi, dan jaringan distribusi yang mendistribusikan ke tempat tinggal, usaha, dan sektor industri. Energi listrik yang dikonsumsi masyarakat menunjukkan seberapa besar penggunaan energi listrik yang dapat membantu dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk peningkatan produktivitas ekonomi. Yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena listrik sangat dibutuhkan sebagai faktor utama dalam menunjang kegiatan proses produksi di sektor manufaktur.

Keterbatasan jaringan listrik dapat menimbulkan konsekuensi serius serta merugikan bagi kegiatan ekonomi dan sosial di sebuah daerah:

1. Hambatan pada Aktivitas Ekonomi: Tanpa aliran listrik yang stabil, perusahaan dan sektor industri mengalami kesulitan dalam menjalankan operasinya secara optimal, sehingga produksi dan pertumbuhan terhambat.
2. Penurunan Investasi: Keterbatasan listrik mengurangi daya tarik wilayah tersebut bagi para investor, yang pada gilirannya menurunkan aliran investasi dan perkembangan ekonomi.

3. Pendidikan Terbatas: Tidak tersedianya listrik mengganggu proses belajar, khususnya pada malam hari, serta mempersempit akses ke materi edukasi digital.
4. Layanan Kesehatan Terkendala: Fasilitas kesehatan yang tidak memperoleh pasokan listrik yang memadai tidak dapat mengoperasikan peralatan medis penting, menyimpan obat dalam kondisi yang diperlukan, atau melayani pasien secara nonstop.
5. Air Bersih dan Sanitasi: Pompa air dan sistem sanitasi membutuhkan energi listrik; kekurangan listrik dapat menghambat penyediaan air bersih serta pengolahan limbah.



Gambar 4 : Jumlah Air Bersih yang Disalurkan Perusahaan Air Bersih

Sumber : Badan Pusat Statistika, diolah

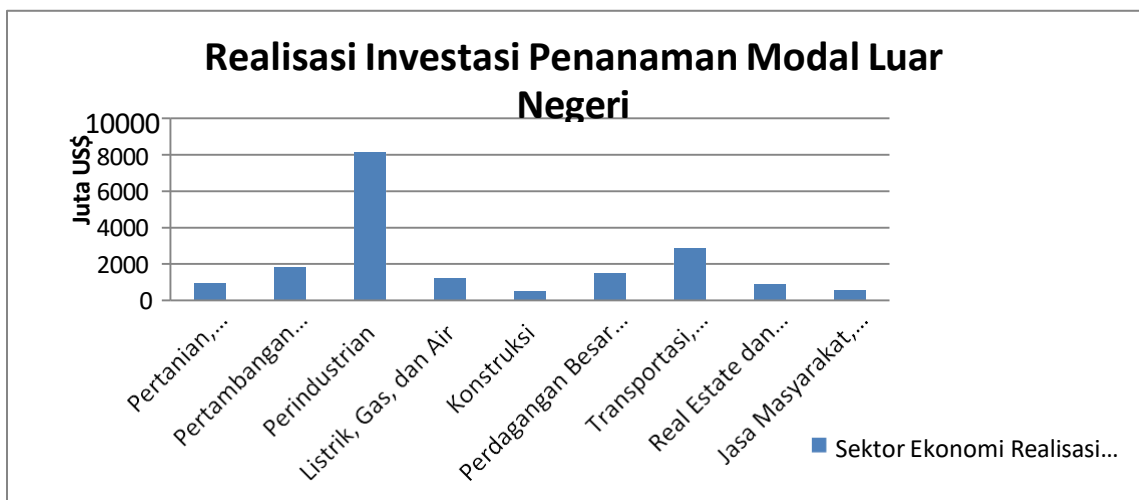
Berdasarkan grafik batang jumlah air bersih yang di salurkan perusahaan air bersih dalam satuan ribu, kapasitas penyaluran air bersih di suatu wilayah sangat berkorelasi linear dengan densitas penduduk, tingkat urbanisasi, serta ketersediaan infrastruktur jaringan perpipaan yang dikelola oleh perusahaan air minum daerah. Pada provinsi 15 menunjukkan lonjakan volume distribusi yang sangat ekstrem yaitu menembus angka di atas 500.000 ribu m³. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan pusat konsumsi utama, yang merupakan provinsi dengan kota-kota metropolitan atau pusat industri yang memiliki kebutuhan hidrasi dan sanitasi skala besar.

Secara teknis operasional, fluktuasi tajam pada grafik ini menggambarkan perbedaan tingkat secara efisiensi sistem distribusi dan jangkauan pelayanan antarwilayah. Sebagian besar provinsi lainnya berada pada level distribusi di bawah 100.000 ribu m³, bahkan banyak yang mendekati titik nol pada sumbu vertikal. Menggambarkan adanya keterbatasan akses air bersih perpipaan atau ketergantungan masyarakat setempat terhadap sumber air alternative non-perusahaan seperti sumur mandiri. Ketimpangan ini dalam kajian geografi ekonomi sering kali disebabkan oleh tantangan topografi, ketersediaan sumber air baku, serta kapasitas fiskal daerah dalam mengembangkan instalasi pengelolaan air.

Ketersediaan air mengacu pada volume aliran air yang diperkirakan secara terus-

menerus berada di suatu titik, seperti bendungan atau struktur air lain pada sungai, dengan nilai tertentu dalam periode waktu tertentu. Air yang tersedia dapat di manfaatkan untuk beragam tujuan, antara lain sebagai air domestik untuk konsumsi dan kebutuhan rumah tangga, serta air non-domestik untuk kegiatan perdagangan, industri, pemeliharaan sungai, peternakan, perikanan, irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air.

Agar penggunaan air menjadi lebih efisien, perlu diketahui ketersediaan sumber air yang dapat diandalkan, baik dari debit maupun curah hujan. Aliran referensi merupakan aliran minimum sungai dengan volume tertentu yang dapat terisi kembali dan dapat dipakai untuk berbagai kebutuhan. Debit minimum sungai untuk irigasi biasanya ditetapkan pada 80% sementara untuk air baku biasanya 90%.



Gambar 5 : Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri

Sumber : Badan Pusat Statistika, diolah

Investasi menjadi faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. Sebagai elemen krusial dalam pembangunan ekonomi, investasi berhubungan erat dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi di masa depan. Karena peningkatan produksi barang dan jasa akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, yang kemudian memperoleh upah dan meningkatkan daya beli. Semakin banyak investasi yang dialokasikan untuk produksi barang dan jasa. Semakin besar penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya menyeimbangkan pendapatan per kapita dan mengurangi kesenjangan.

Pada grafik ini menunjukkan adanya konsentrasi modal yang sangat masif pada sektor perindustrian, yang mencatat nilai realisasi tertinggi melampaui angka 8.000 juta US\$. Menggambarkan bahwa investor luar negeri memiliki kepercayaan tinggi terhadap stabilitas dan prospek nilai tambah di sektor manufaktur. Penempatan modal yang dominan pada sektor

Ini mencerminkan strategi global untuk memanfaatkan keunggulan komparatif

wilayah tersebut. Baik dari sisi ketersediaan bahan baku, tenaga kerja maupun potensi pasar, dibawah sektor industri terdapat sektor transportasi, gudang, dan komunikasi muncul sebagai kontributor terbesar kedua dengan realisasi mendekati angka 3.000 juta US\$. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan fungsional yang erat antara pertumbuhan industri dengan kebutuhan infrastruktur logistik dan konektivitas digital.

Investasi mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Fluktuasi investasi, baik penurunan maupun kenaikan, sangat berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya memengaruhi disparitas pendapatan di suatu daerah. Peningkatan investasi dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengembalikan pendapatan sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan. Sebaliknya, tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi biasanya menandakan rendahnya investasi yang masuk. Oleh sebab itu, untuk menurunkan ketimpangan pendapatan, diperlukan dorongan ekonomi melalui penyaluran modal yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan produksi, dan menghasilkan keuntungan di masa mendatang.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang kuat akan menarik investor domestik maupun asing untuk menanamkan modal, yang pada akhirnya dapat menutup kesenjangan sosial. Investasi memegang peranan penting sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, terutama di tengah dinamika globalisasi yang membuka peluang sekaligus tantangan baru. Investasi, baik asing maupun domestik, tidak hanya berfungsi sebagai medium transfer teknologi dan pengetahuan yang mempercepat modernisasi dan diverifikasi ekonomi. Kontribusi investasi terhadap peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan infrastruktur menjadi kunci dalam memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Kesimpulan

Pembangunan ekonomi di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah yang dipengaruhi oleh perbedaan kualitas infrastruktur, distribusi, investasi, ketersediaan energi listrik, akses air bersih, serta tingkat perkembangan ekonomi daerah. Perbedaan produk domestik bruto (PDB) antarprovinsi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih belum merata termasuk antarwilayah. Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, data menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan jalan di Indonesia berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang artinya jalan daerah menjadi sarana utama mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi.

Keterbatasan kualitas infrastruktur jalan dapat menghambat pembangunan dan memperluas ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan infrastruktur jalan menjadi langkah untuk perkembangan perekonomian Indonesia. Distribusi energi listrik mendeskripsikan sektor rumah tangga dan industri merupakan

penggunaan listrik terbesar. infrastruktur listrik yang baik mampu mendukung kegiatan produksi industry dan pengembangan usaha. sebaliknya pembatasan akses listrik dapat menghambat aktivitas ekonomi. ketersediaan air bersih menjadi indikator penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, faktor investasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pendapatan. Tingginya investasi pada industri menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pemerataan pembangunan, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, tetapi dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat sehingga kesejahteraan nasional dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Alfin, E., Rahmatulloh, R., & Suendarti, M. (2022). Infrastruktur air dan tantangan di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 382-391.

Al Hadi, M. (2022). Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan ekspor terhadap produk domestik bruto (pdp) Indonesia tahun 1997-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(2).

Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). Analisis pengaruh pendidikan, upah minimum provinsi dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494.

Damanik, D., Damanik, P., & Nopeline, N. (2024). Analisis pengaruh infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pematang Siantar. *Jurnal KAFEBIS*, 2(1), 59-67.

Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243-258.

Maskur, S. R. R., Aedy, H., Saenong, Z., Alwi, S., & Barani, L. O. S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 8(1), 82-95.

Nasution, M. (2020). Ketimpangan antar wilayah & hubungannya dengan belanja pemerintah: Studi di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(2), 84-102.

Panggarti, U., Zumaeroh, Z., Purnomo, S. D., Retnowati, D., & Adhitya, B. (2022, April). Studi komparatif ketimpangan antar pulau di Indonesia. In *forum ekonomi* (Vol. 24, No. 2, pp. 288-298).

Rahayu, E. T., Putri, A. L. I., & Huda, A. M. (2026). Dampak Infrastruktur Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Suatu Tinjauan Pustaka. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 8012-8017.

Regina, T. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 36-45.

Rudiawan, H. (2019). Dampak Faktor-Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia. *Jurnal ekonomi*, 21(1), 1-15.

Sabaha, A., Hanum, K. F., Mumtaz, A., Amilia, L., Rajan, G., Fadhilah, M. F., ... & Desmawan, D. (2025). Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah: Studi Kasus Kota Tangerang Dan Kabupaten Pandeglang. *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 37-42.

Salsabila, A. D., Putri, R., & Ermawati, L. (2025). Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan, Listrik Dan Air Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2024. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 9(2), 121-135.

Shinetiara, T., & Adry, M. R. (2023). Determinan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 25-32.

Statistik, B. P. (2026). Badan pusat statistik. *Badan Pusat Statistik*.

Sukwika, T. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 115-130.

Tamba, A. V., Purba, M. L., & Sihotang, J. (2023). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing terhadap produk domestik bruto di Indonesia periode 2000-2020. *Jurnal Kafebis*, 1(1), 1-10.

Umiyati, E. (2014). Analisa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(2).

Wibowo, K. P., & Pangestuty, F. W. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 539-549.

Zasriati, M. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia Tahun 2010-2020. *Al Dzahab*, 3(2), 119-131.